

RESOLUSI JIHAD NU 1945
PERAN POLITIK DAN MILITER NU DALAM MEMPERTAHANKAN
KEDAULATAN NKRI



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh :

**GUNAJI
NIM : 04370054**

DOSEN PEMBIMBING :

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag
2. Drs. M. RIZAL QOSIM, M. Si

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Fakta sejarah membuktikan bahwa kaum tradisionalis pesantren atau yang tergabung dalam *jam'iyyah* NU memiliki kesadaran nasionalisme kebangsaan lebih awal daripada kelompok organisasi lain, baik yang kedaerahannya ataupun keagamaan. Sehingga ruh kebangsaan untuk membela tanah air itu tertanam kuat dalam sanubari para santri. Sikap anti penjajah NU menyebabkan antisipasinya terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut Republik Indonesia demikian cepat. Melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, sudah mempunyai kontitusinya sendiri (UUD 1945, di mana NU merasa mempunyai andil dalam proses-proses perumusannya) mendorong organisasi ini pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan sebuah *Resolusi Jihad*.

Permasalahan yang hadir dalam penelitian ini difokuskan pada peranan Resolusi Jihad NU, baik peran politik maupun peran militer dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ada dua pokok permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini. *Pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Resolusi Jihad NU tahun 1945. *Kedua*, dampak dari Resolusi Jihad NU baik terhadap NKRI maupun dampak bagi NU sendiri.

Dalam kaitan ini, Nahdlatul Ulama mendasari dengan empat semangat: (1) *ruh al-tadayun* (semangat beragama yang dipahami, didalami dan diamalkan), (2) *ruh al-wathaniyah* (semangat cinta tanah air), (3) *ruh al-ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan), dan (4) *ruh al-insaniyah* (semangat kemanusiaan). Keempat semangat itu NU selalu melekat dan terlibat dalam proses perkembangan Indonesia dengan semangat kebangsaan dan keagamaan yang saling melengkapi.

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa Resolusi Jihad tahun 1945 itu terjadi. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menemukan relevansi peristiwa Resolusi Jihad dengan fakta-fakta sosial keagamaan yang terjadi, baik dalam kehidupan internal NU ataupun kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat penemuan data yang menunjukkan bahwa Resolusi Jihad NU memiliki peran yang sangat vital dalam mempertahankan kedaulatan NKRI yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat yang kafir. Resolusi tersebut adalah keputusan politik NU yang memandang seruan *jihad fi sabillah* sesuai dengan konteks keadaan. NU yang mengambil keputusan Resolusi Jihad-nya melalui rapat konsul-konsul se-Jawa dan Madura, sekaligus menjadi keputusan Muktamar di Puriwokerto berjihad untuk kepentingan bangsanya.

Selain itu terdapat penemuan data yang menunjukkan bahwa Resolusi Jihad benar-benar menjadi faktor penentu berlanjut atau tidaknya kemerdekaan Indonesia. Namun, pengorbanan itu ternyata tidak mendapatkan penghargaan yang memadai. Justru peran NU terutama dalam Resolusi Jihad, termasuk banyak dukungan NU terhadap kedaulatan dan persatuan bangsa disembunyikan dari catatan sejarah.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/37/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **RESOLUSI JIHAD NU 1945
PERAN POLITIK DAN MILITER NU
DALAM MEMPERTAHANKAN
KEDAULATAN NKRI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Gunaji
NIM : 04370054
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A

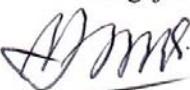
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I


Drs. H. Abdul Majid AS, M. Si
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II


H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 29 Juli 2009



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DARTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaannya.....	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II JAM'IYAH NAHDLATUL ULAMA	24
A. Latar Belakang Berdirinya NU	24
B. Nasionalisme Para Kyai	30
C. Kota Surabaya. Kota Santri dan Kota Pahlawan.....	35

BAB III	LAHIRNYA RESOLUSI JIHAD NU	41
A.	<i>Definisi Jihad</i>	41
B.	<i>Laskar Hizbullah dan Sabiliyah</i>	46
C.	<i>Isi Resolusi Jihad</i>	61
BAB IV	DAMPAK RESOLUSI JIHAD NU	57
A.	<i>Dampak Internal Terhadap NU</i>	57
B.	<i>Dampak Terhadap Kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia..</i>	61
BAB V	PENUTUP	67
A.	<i>Kesimpulan</i>	67
B.	<i>Saran-Saran</i>	69
C.	<i>Penutup.....</i>	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		
A.	<i>Teks Resolusi Jihad NU.....</i>	I
B.	<i>Biografi Ulama.....</i>	IV
C.	<i>Curriculum Vitae</i>	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepaskan dari peran para pejuang Muslim, atau lebih tepatnya kaum santri.¹ Kaum santri adalah masyarakat Jawa yang secara sosial budaya memegang kuat tradisi lokal namun juga sangat taat terhadap ajaran-ajaran agama, seperti ibadah shalat lima waktu, puasa Ramadhan atau membayar zakat.²

Kaum santri yang sering dituduh oleh kaum pembaharu sebagai ahli *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat* memang memiliki latar belakang sosial tradisionalis-agraris, yang hidup di pedesaan dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Wajar jika *stereotype* yang dituduhkan kelompok luar, baik kelompok nasionalis maupun kelompok Islam pembaharu, menyebut kaum santri tradisionalis tidak memiliki kepekaan terhadap dunia luar, baik isu politik, sosial dan budaya.

Sekali lagi menurut Geertz, yang termasuk dalam kelompok yang

¹ Sebutan santri, jika berdasar pada tipologi kultural keagamaan dari antropolog Belanda Clifford Geertz yang membagi masyarakat menjadi tiga tipologi; santri, abangan dan priyayi. Lihat Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 64.

² Harsya W. Bachtiar memberikan kritik terhadap Geertz, bahwa mengklasifikasikan masyarakat Jawa dalam golongan agama sangatlah tidak tepat, karena ketiga golongan yang disebutkan tersebut tidak bersumber dari satu sistem klasifikasi yang sama. Abangan dan santri adalah penggolongan berdasarkan tingkat ketiaatan dalam menjalankan ibadah agama Islam, sedangkan priyayi adalah suatu penggolongan sosial. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 348.

tradisionalis-konservatif ini seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Sedangkan yang dikategorikan sebagai kelompok pembaharu yang modernis adalah Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Bagi Geertz, kalangan modernis dicirikan sebagai kelompok skipturalis dengan mengedepankan rasionalitas, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan gaya Barat.

Sementara kalangan santri yang tradisionalis dicirikan dengan kecenderungan kepada mistik, sinkretisme, kehidupan rural dan lebih berorientasi akhirat. Hanya saja menurut Dr. Fauzan Saleh, kajian etnografis yang dilakukan Geertz di Jawa Timur tahun 1950-an tersebut tidak bisa dipertahankan untuk mendeskripsikan kondisi saat ini.³

Kondisi riil yang dihadapi kelompok santri-tradisionalis tidak lain adalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan kejumudan. Sementara kaum muslim modernis hidup berkecukupan secara ekonomi, sebagai pedagang dan para pegawai pemerintah. Tetapi bukan berarti kelompok santri tradisionalis itu tidak peka terhadap persoalan kebangsaan. Justru kaum muslim tradisionalis yang dikomando para kyai, baik dalam urusan agama maupun politik, dalam sejarah telah menunjukkan bukti bahwa mereka kaum tradisionalis sangat loyal kepada tanah air.

Bahkan pesantren yang dipandang hanya menjadi tempat pendidikan agama yang konservatif, pada akhirnya juga membuka diri dan terlibat dalam dinamika pendidikan modern. Dalam konteks ini, tokoh yang berperan dalam

³ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 21.

pembaruan kurikulum pesantren adalah KH. Mohammad Ilyas dan KH. Abdul Wahid Hasyim, putra KH. Hasyim Asy'ari. Atas persetujuan KH. Hasyim Asy'ari, kedua tokoh muda tersebut memasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan bahasa Melayu. Semenjak itu pula surat kabar berbahasa Melayu diizinkan masuk ke pesantren. Walaupun KH. Hasyim Asy'ari dianggap cukup konservatif, namun pembaharuan dalam pesantren di Tebuireng sempat menimbulkan reaksi yang cukup hebat, hingga sejumlah orang tua memindahkan anak-anaknya ke pesantren lain. Tebuireng sudah dianggap terlalu modern.⁴ Wajar jika pada saat itu terjadi pro-kontra saat pesantren memulai pembaruan.

Namun buahnya bisa dilihat saat ini, perpustakaan pesantren Tebuireng menjadi laboratorium keilmuan yang representatif dan terbuka dengan dialektika perkembangan zaman. Dari pembaruan kurikulum inilah kemudian pesantren mampu mencetak kyai-kyai yang memiliki keilmuan agama yang tinggi, ber-*akhlak karimah*, berkarakter, kharismatik, namun sekaligus memiliki wawasan kebangsaan dan wacana modernitas. Itulah karakter yang melekat dalam pribadi seorang kyai yang merupakan produk pendidikan pesantren.

Aboebakar Atjeh menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kyai besar dan berpengaruh, yaitu: pengetahuannya,

⁴ Menurut catatan Harry J. Benda, dipastikan pada tahun 1920-an dan 1930-an pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur merupakan pesantren yang paling masyhur di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 6000 orang santri. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, cet. ke-2, terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 71.

kesalehannya, keturunanya dan jumlah muridnya.⁵ Modal kultural dan modal spiritual yang dimiliki para kyai, pada akhirnya mampu menggerakkan para santri dan pengikutnya untuk membela tanah air.

Hanya saja dalam sejarah, peran kaum bersarung,⁶ sengaja disingkirkan dari lembaran catatan yang bersejarah. Pesantren dengan para kyainya, jauh sebelum terorganisir dalam *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama (NU), sudah terbukti berperan dalam setiap gerakan sosial mewujudkan cita-cita keadilan dan kemerdekaan orang-orang pribumi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan, Sartono Kartodirdjo, bahwa peristiwa pertentangan sosial politik terhadap penguasa kolonial, menurut laporan pemerintah Belanda sendiri, dipelopori oleh para kyai sebagai pemuka agama, para haji dan guru-guru ngaji. Bahkan tidak jarang pula para kyai menjalin kerjasama dengan kalangan bangsawan Jawa.⁷

Ada adagium yang populer, sejarah selalu diciptakan oleh penguasa. Artinya siapa yang menang, siapa yang berkuasa, dialah yang berhak membuat cerita dan menulis sejarah untuk anak cucu. Wajar jika peran orang kaum tradisionalis-pesantren sulit dilacak. Sejarah yang merupakan produk para penguasa tidak pernah berkata jujur tentang peran para laskar santri yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 109

⁶ Sebutan kaum bersarung bagi santri, karena sarung, sandal *bakiak* (terbuat dari kayu) dan sikap kesederhanaan mereka menjadi identitas sekaligus bermakna ideologis. Dalam artian, ketika system pendidikan Barat memakai simbol-simbol pakaian seperti celana, dasi dan sepatu, maka KH Hasyim Asy'ari mengkampanyekan kepada para santri untuk tidak meniru *lifestyle* kolonialisme Belanda yang kafir. Hal ini berdasarkan pada hadis, “*man tasyabbahâ biqaumin fahuwa minhum*”.

⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 1.

terhimpun dalam *Hizbullah*, maupun laskar para kyai yang tergabung dalam *Sabilillah* dalam berperang melawan penjajah. Sejarah milik penguasa juga tidak memberikan kabar kepada anak cucu bangsanya, tentang keterlibatan dan loyalitas KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ *Dokuritsu Zyuni Tyoosakai* (BPUPKI). Sejarah yang diajarkan kepada anak-anak sekolah juga tidak mengenalkan peran “Resolusi Jihad” yang dikomandoi KH. Hasyim Asy’ari, yang mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk mempertahankan kemerdekaan bagi setiap orang muslim.

Jauh sebelum NU terbentuk tahun 1926, sebagai organisasi para kyai dan pesantren, pernah lahir organisasi pemuda muslim yang bernama *Syubhanul Wathon* (Pemuda Tanah Air). Organisasi ini berdiri atas prakarsa KH. Wahab Chasbullah pada tahun 1924. Para anggotanya pada mulanya adalah para guru madrasah *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). *Nahdlatul Wathan* menurut Martin van Bruinessen adalah sebuah lembaga pendidikan yang berupa sekolah, bukan madrasah atau pesantren. Bruinessen menegaskan bahwa *Nahdlatul Wathan*, sekali lagi bukan pesantren atau madrasah, tetapi lembaga pendidikan sekolah yang bercorak nasionalis moderat.⁸ Tetapi H. Umar Burhan sebagaimana dikutip oleh Andree Feillard menyebut *Nahdlatul Wathan* sebagai madrasah. Andree mengutip H. Umar Burhan yang menulis, “Pada tahun 1916 Kyai Wahab Chasbullah mendirikan sebuah madrasah yang bernama *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air),

⁸ Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. ke-1, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 35.

dengan gedungnya yang besar dan bertingkat di Surabaya.⁹

Secara khusus *Syubhanul Wathan* adalah perkumpulan para pemuda pesantren, dengan nama yang berbeda dengan perkumpulan pemuda yang lain. Pada saat itu para pemuda dari daerah lain membentuk Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemuda Betawi, dan sejenisnya yang bersifat kedaerahan. Tetapi pemuda-pemuda pesantren yang berkumpul di Surabaya ini mendirikan perkumpulan muda yang berbeda dengan yang lain. Mereka menyebut diri *Syubbanul Wathon*, Pemuda Tanah Air. Kelak setelah NU berdiri organisasi para pemuda pesantren ini berganti nama menjadi Ansor Nahdlatul Oelama (ANO) dan menyatu dalam pasukan non regular Hizbulullah di bawah komando para kiai berada di garda depan perjuangan merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁰

Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa kaum tradisionalis pesantren atau yang tergabung dalam *jam'iyyah* NU memiliki kesadaran nasionalisme kebangsaan lebih awal daripada kelompok organisasi lain, baik yang kedaerahan ataupun keagamaan. Sehingga ruh kebangsaan untuk membela tanah air itu tertanam kuat dalam sanubari para santri.

Namun kaum nasionalis dan muslim modernis Indonesia seringkali membuat gambaran sepihak mengenai NU sebagai kaum konservatif dan reaksioner. Sejarawan nasionalis, A.K. Pringgodigdo, dalam surveinya

⁹ H. Umar Burhan menulis dalam Aula, majalah milik NU Jawa Timur, no. 1, tahun III, 1981. Lihat Andree Feillard, *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, cet. ke-2, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 8.

¹⁰ A. Khoirul Anam, "Kilas Resolusi Jihad dan Peristiwa 10 November," <http://www.nu.or.id>, akses tanggal 20 Mei 2009.

mengenai gerakan nasionalis Indonesia (1950), hanya menyebut NU untuk mengkritik rendahnya kadar nasionalisme. Para apolog NU, di pihak lain berkali-kali mengklaim bahwa patriotisme sejak semula merupakan kekuatan pendorong berdirinya organisasi *Nahdlatul Wathan*. Mereka tidak dapat mendukung klaim ini dengan banyak bukti kontemporer, tetapi nama sekolah *Nahdlatul Wathan* adalah indikasi bahwa Kyai Wahab paling tidak juga didorong oleh kesadaran nasional tertentu. Sebuah indikasi yang lebih jelas lagi adalah nyanyian patriotik yang ditulis oleh Kyai Wahab dalam bahasa Arab, yang biasa dinyanyikan oleh para murid di sekolah *Nahdlatul Wathan*. Teks nyanyian dan terjemahan dalam bahasa Indonesianya yang agak dibumbui, dapat ditemukan dalam Anam 1985: 25-26. Menurut beberapa sumber yang simpatik, Kyai Wahab juga ambil bagian dalam *Indonesische Studie Club*-nya Dr Sutomo, sebuah kelompok studi kaum intelektual nasionalis yang dibentuk pada tahun 1924.¹¹

Dalam awal kehadiran seperti itu, NU sebenarnya bisa dilihat sebagai gerakan yang mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran sekaligus.¹² Pertama, sebagaimana tampak dalam uraian dimuka, NU mengarahkan perjuangannya pada upaya memperkuat dan mengembangkan amal ibadah dan akidah yang mendapat serangan-serangan kaum “pembaharu”. Sementara di dalam dirinya, NU secara aktif mengembangkan persepsi keagamaannya yang baru terutama dalam kaitan dengan amal-amal sosial, pendidikan dan

¹¹ Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, hal. 35.

¹² Slamet Effendi Yusuf dkk., *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, edisi ke-1 (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 34.

ekonomi. Perubahan-perubahan di lingkungan NU, bukan tidak terjadi. Tetapi, khas NU, perubahan yang dilakukan selalu dilaksanakan dengan kearifan pada sistem budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹³ *Kedua*, perjuangan NU juga diarahkan kepada kolonialisme Belanda. Pola yang dipakai dalam perjuangan menghadapi Belanda tampak jelas, banyak bersifat kultural. Dalam kaitan ini, NU misalnya mengeluarkan kata putusnya yang mengharamkan pantalon dan dasi. Atau disegi yang lain menolak sistem pendidikan model Belanda dan sebagainya. Bagi mereka yang ingin kembali pada teks Al-Qur'an dan Al-Hadits, sulit menemukan landasan hukum haram atas pantalon dan dasi. Tetapi bagi mereka yang memahami metode pengambilan hukum (*istinbath*) di kalangan ulama NU, maka sikap itu bisa dipahami. Ketika NU memakai hadits; *man tasyabbahâ bi qaumin fahuwa minhum* (siapa yang menyerupai suatu golongan, tentu dia merupakan bagian mereka), orang harus memahami siapa Belanda dalam pandangan kaum muslimin.

Perlawaan kultural terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti akan diuraikan kemudian, berhasil membentuk kiai dan santri-santrinya menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat anti penjajah. Pada gilirannya, sikap anti penjajah ini memberikan sumbangan yang sangat besar pada perjuangan menuju Indonesia.

Demikian, perjuangan NU yang mengambil bentuk kultural dalam menghadapi penjajah Belanda, pada akhirnya menjadi watak dasar yang membedakan NU dengan gerakan-gerakan anti penjajah yang lain. Apalagi

¹³ *Ibid.*

dibandingkan dengan SI yang sangat diwarnai oleh watak politiknya. Namun demikian, ketika perjuangan politik melawan Belanda makin banyak melibatkan golongan-golongan di Indonesia. Kontak-kontak secara langsung antara tokoh-tokoh NU dengan berbagai kalangan, tidak bisa dihindari. Apalagi kemudian NU harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Belanda secara terus-menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan bangsa dan agama. Dalam hubungan ini kita melihat NU yang menentang Ordonansi Guru, Ordonansi Pencatatan Perkawianan 1937 (sejenis UU perkawinan) menolak milisi untuk menghadapi Jepang, ikut menuntut Indonesia berparlemen, penolakan kepada usaha penacobutan artikel 177 *Indische Staatregeeling* yang mengandung semangat diskriminasi golongan dan agama, dan lain-lain.¹⁴

Sikap-sikap itu mendatangkan kesadaran baru, bahwa kekuasaan Belanda secara terus-menerus dihadapkan kepada Islam. Untuk mengakhiri kekuasaan yang seperti ini, bagaimanapun pemerintahan Belanda harus diakhiri. Dan untuk itu bangsa Indonesia harus merdeka. Mulai saat itu secara luas, intensitas keterlibatan NU kepada perjuangan politik makin kelihatan. Kebijaksanaan Belanda yang merusak syari'at Islam membawa hikmah tersendiri, ketika NU bersama Muhammadiyah bersama-bersama membentuk *Majlisul Islam A'la Indonesia* (Majlis Tertinggi Islam Indonesia), yang disingkat MIAI, yang berdiri pada tanggal 21 September 1937. NU secara resmi masuk sebagai organisasi anggota MIAI dalam Kongres Al-Islam yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35

diselenggarakan pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938, walaupun tokoh utamanya ikut mensponsori pendiriannya.¹⁵

Beberapa hal yang mendorong pertemuan beberapa tokoh Islam itu antara lain karena adanya kecaman terhadap Islam oleh seorang penulis dalam sebuah surat kabar yang dirasakan menghina Islam, soal Palestina yang menghangat, serta soal pengadilan agama dan perkara waris. Pertemuan yang disponsori Abdul Wahab Hasbullah, Mas Mansur, Ahmad Dahlan (Kebondalem, Surabaya) dan Wondoamiseno, akhirnya memutuskan untuk mendirikan suatu badan federasi permusyawaratan MIAI.¹⁶

Harry J. Benda menunjukkan bukti bahwa perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan luar, akhirnya menyempitkan jurang perbedaan antara kaum reformis dan ortodoks.¹⁷

Pada tahun 1943, MIAI mengundang kongres Al-Islam, yang merupakan kongres pertama yang penyelenggaranya dilakukan oleh organisasi keagamaan terbesar, di saat PSII mulai merosot pengaruh keagamaannya, seperti tercermin oleh perpecahan di antara para pemimpinnya.

Arena perjuangan politik NU makin melebar ketika Jepang menguasai Indonesia. NU termasuk organisasi yang dilarang oleh Jepang, tetapi NU sudah tidak mungkin dibendung. Sarana komunikasi yang sangat beragam yang dipunyai NU berupa pranata dan institusi sosial, tidak mungkin

¹⁵ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, edisi ke-2 (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁷ Slamet Effendi Yusuf dkk., *Dinamika Kaum Santri*, hlm. 36.

menghentikan organisasi NU secara material. Ketika Jepang mewajibkan agar bangsa Indonesia mengikuti pendewaan terhadap Kaisar Jepang Tenno Haika dengan cara membungkukkan badan kearah Timur pada waktu-waktu tertentu, NU langsung menyatakan penolakannya. Seperti juga semua orang Islam, pendewaan kepada selain Allah, dipandang sebagai perbuatan *syirik* oleh NU. KH. Hasyim Asy'ari secara terbuka menyatakan penolakan itu. Dan Jepang mencoba menghambat penolakan ini dengan menjebloskan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari ke dalam tahanan. Orang-orang Islam dengan peristiwa ini mulai mengetahui, bahwa Jepang tidak memenuhi janjinya yang menyatakan akan menghormati agama Islam. *Saikeirei* yang mereka wajibkan kepada bangsa Indonesia secara luas merupakan api yang membakar perlawanan umat Islam. KH. Zaenal Musthofa dari Singaparna, seorang anggota NU kemudian mengangkat senjata, suatu perlawanan bersenjata yang pertama kali kepada Jepang.

Perlawanan itu berhasil dipadamkan, tetapi bukan berarti tidak membawa hasil. Kebijaksanaan Jepang kepada Islam mulai berubah. Bulan itu juga dua organisasi Islam, NU dengan Muhammadiyah dicairkan pembekuannya. Ketika MIAI mencapai akhir pengabdiannya dengan dibentuknya federasi baru *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Dewan Permusyawaratan Muslimin Indonesia), yang disingkat Masyumi, KH. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi pimpinan tertinggi. Tetapi dengan ini tidak serta merta merubah perlawanan NU terhadap Jepang. Sesudah pada tanggal 7 Nopember 1945 Masyumi dinyatakan menjadi Partai Politik dan NU

menduduki Ketua Umum Majlis Syuro, yakni KH. Hasyim Asy'ari, serta menjadi salah seorang ketuanya yaitu KH. Wahid Hasyim, maka masuknya NU ke dalam gelanggang politik makin dalam. Dibentuknya organisasi latihan kemiliteran *Hizbullah* (dengan panglimanya KH. Zainul Arifin, NU) dan masuknya KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Masykur ke dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memperluas jaringan keterlibatan tokoh-tokoh NU ke dalam perkembang politik Indonesia.¹⁸

Sikap anti penjajah NU menyebabkan antisipasinya terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut Republik Indonesia demikian cepat. Melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, sudah mempunyai kontitusinya sendiri (UUD 1945, di mana NU merasa mempunyai andil dalam proses-proses perumusannya) mendorong organisasi ini pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan sebuah *Resolusi Jihad*. Sebelumnya NU mengirim surat resmi kepada pemerintah diantaranya berbunyi: “Memohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap Belanda dan kaki tangannya. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan yang bersifat “*sabilillah*” untuk tegaknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan beragama Islam.”¹⁹ Pernyataan yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁹ Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, , edisi ke-2 (Surabya: Khalista, 2008), hlm. 95.

diputuskan dalam suatu rapat para konsul NU se-Jawa itu berbunyi²⁰:

1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan.
3. Musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
4. Umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
5. Kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam (*fardlu 'ain*) yang berada pada jarak radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan sembahyang *jama'* dan *qasar*). Adapun mereka yang berada diluar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km tersebut.

Resolusi Jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir *Allâhu Akbar* yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan.²¹

²⁰ Slamet Effendi Yusuf dkk., *Dinamika Kaum Santri*, hlm. 38.

²¹ Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, hlm. 95.

B. Pokok Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah, pokok masalah menjadi penting untuk memberikan arahan yang tepat agar sebuah karya ilmiah tidak keluar dari alur permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hadir dalam penelitian ini difokuskan pada peranan Resolusi Jihad NU, baik peran politik dan militer dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Secara sederhana pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya Resolusi Jihad NU tahun 1945?
2. Bagaimana dampak dari Resolusi Jihad NU baik terhadap NKRI maupun dampak bagi NU sendiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a) Menjelaskan faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya Resolusi Jihad NU tahun 1945.
 - b) Menjelaskan dampak dari Resolusi Jihad NU baik terhadap NKRI maupun dampak bagi NU sendiri.

2. Kegunaan

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan politik Islam, peneliti, khususnya akademisi yang konsentrasi pada disiplin ke-NU-an.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan publik tentang sejarah dan peran politik NU untuk menempatkan para pejuang dan pahlawan NU sesuai dengan pengorbanannya bagi bangsa dan Negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pergulatan sejarah NU yang multidimensional memberi warna tersendiri dalam sejarah republik ini. Sehingga dibutuhkan kajian yang utuh dan mendalam untuk menyelami setiap momen-momen yang melibatkan NU dalam konteks kebangsaan. Berdasarkan riset penulis, tema Resolusi Jihad NU 1945, belum banyak peneliti yang secara utuh mengupas peran Resolusi Jihad. Ada beberapa buku karya peneliti Barat tentang NU tetapi tidak banyak menyinggung momentum Resolusi Jihad secara mendalam. Mereka adalah Martin van Bruinessen, Andree Feillard, Karel A. Steenbrink, Greg Fealy, Greg Barton dan masih ada beberapa peneliti Barat yang mengangkat tema ke-NU-an, namun sangat terbatas data-data tentang Resolusi Jihad. Demikian juga ada beberapa artikel dari A. Khoirul Anam dan Hairus Salim HS,²²

²² Artikel Hairus Salim HS yang dimuat di Harian Kompas edisi Jum'at, 10 November 1995. Lihat Hairus Salim HS, "50 Tahun Resolusi Jihad NU" apakabar@access.digex.net, akses tanggal 20 Mei 2009.

tentang Resolusi Jihad NU 1945, namun belum menjadi karya utuh yang secara spesifik berisi peran Resolusi Jihad NU 1945.

Saat ini hanya ada satu karya penelitian mahasiswa yang mengkaji tentang Resolusi Jihad NU 1945. Adapun karya tersebut yang penyusun ketahui adalah: Skripsi Yulianta Wahyu Hidayat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, tentang *Fatwa Jihad NU dalam konteks Negara Indonesia; Studi Analisis terhadap Resolusi Jihad NU tahun 1945 dan 1946*.²³ Skripsi ini mengupas Potret NU dan Tinjauan Umum Jihad, Isi Resolusi Jihad NU dan analisis normatif Resolusi Jihad. Dalam skripsi ini penyusun tidak banyak membahas sikap nasionalisme dan patriotisme NU yang ditunjukkan dalam momentum Resolusi Jihad.

E. Kerangka Teoritik

Sejak sebelum lahirnya, Indonesia merupakan negara plural yang didiami penduduk yang beraneka ragam suku, adat-istiadat, bahasa daerah, dan menganut berbagai agama, yang tinggal di lebih 17 ribu pulau, memanjang dari barat hingga timur hampir seperdelapan lingkar bumi. Jam'iyyah Nahdlatul Ulama merupakan salah satu komunitas yang hidup di situ, dan sejak mula menyadari dan memahami bahwa keberadaannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari keanekaragaman itu. Karena itu NU terus mengikuti dan ikut menentukan denyut serta arah bangsa ini berjalan.

²³ Yulianta Wahyu Hidayat, “*Fatwa Jihad NU dalam konteks Negara Indonesia; Studi Analisis terhadap Resolusi Jihad NU tahun 1945 dan 1946*,” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Karena itu, segala permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia juga ikut menjadi keprihatinan NU. Ibarat satu tubuh, bila salah satu bagian menderita, maka seluruhnya ikut merasakan.

Dalam kaitan ini, Nahdlatul Ulama mendasari dengan empat semangat:

(1) *ruh al-tadayyûn* (semangat beragama yang dipahami, didalami dan diamalkan), (2) *ruh al-wathâniyah* (semangat cinta tanah air), (3) *ruh al-ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan), dan (4) *ruh al-insâniyah* (semangat kemanusiaan). Keempat semangat itu NU selalu melekat dan terlibat dalam proses perkembangan Indonesia.²⁴

Ruh al-tadayyûn menunjukkan bahwa NU mendorong warganya untuk senantiasa meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama. Dengan nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung dalam Islam, NU menjadi barometer kegiatan beragama yang moderat (*tawâsuth*). Dengan semakin banyaknya konflik kekerasan yang disinggungkan dengan agama, NU harus lebih intensif terus mengembangkan sikap *tawâsuth* ini ke masyarakat, tanpa pandang perbedaan agama dan keyakinan mereka. Pada individu Nahdliyin harus tertanam kesadaran (*ghirah*) Islamiyah (kepekaan membela eksistensi Islam) dan tetap menghormati orang lain yang memeluk agama yang berbeda.

Keterlibatan NU dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, NU telah secara aktif telah menerapkan semangat cinta tanah air atau *ruh al-wathâniyah*. Bahkan, ketika sebagian umat muslim mengajukan syari'at Islam sebagai ideologi negara dengan memasukkan tujuh

²⁴ Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 47.

kata dalam Pancasila yang berbunyi dengan “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya*”, NU rela menghilangkannya demi persatuan bangsa tanpa harus mengorbankan aqidah. Ini gambaran jelas betapa NU sangat konsisten dengan perjuangan para pahlawan yang berasal dari berbagai macam latar belakang agama dan etnis yang ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dengan demikian, sudah menjadi keyakinan warga Nahdliyin bahwa Pancasila merupakan wujud upaya umat Islam Indonesia dalam mengamalkan agamanya.²⁵

Dengan melihat semangat cinta tanah air atau *ruh al-wathâniyah* tersebut, NU sejak awal menyadari bahwa keanekaragaman bangsa ini harus dipertahankan. Bagi NU, keanekaragaman bangsa Indonesia bukanlah penghalang dan kekurangan, melainkan kekayaan dan peluang, sehingga warga Nahdliyin menganggap perlu agar seluruh warganya selalu menjunjung tinggi untuk menghormati keanekaragaman itu. Di dalam Islam sendiri terdapat berbagai aliran dan mazhab yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan perbedaan etnis dan ras serta bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Perbedaan di mata NU bukan untuk dipertandingkan dan diadu mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Perbedaan itu, sebaliknya, ditempatkan sebagai modal bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Di sini dapat dilihat, betapa konflik etnis dan aliran keagamaan dan keyakinan tidak pernah menjadikan NU patah arang, justru dengan konflik-konflik itu NU selalu

²⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

mendorong semua pihak agar menghormati perbedaan yang ada, karena memang bangsa ini bangsa yang multikultural, bangsa yang kaya akan keanekaragaman agama, etnis, ras dan bahasa. Semangat ini biasa disebut dengan *ruh al-ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan).

Ruh al-Insâniyah adalah semangat yang mendorong setiap warga negara Indonesia untuk menghormati setiap hak manusia. Meski NU merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia bahkan di dunia, namun kebesaran itu tidak menjadi NU melihat organisasi masyarakat dan agama yang kecil dengan sebelah mata. Kebesaran ini, bagi NU karena adanya pengakuan hak dan derajat yang sama kepada semua warga negara, yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi pandangan orang tentang penghargaan NU terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang pada akhirnya orang-orang yang sebelumnya tidak menjadi warga NU kemudian beralih menjadi warga Nahdliyin.

Keempat semangat inilah yang menjadi kunci NU kemudian menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Dengan demikian, sebuah kemunduran jika NU melupakan empat semangat tersebut.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kontribusi politik dan militer NU dalam momentum Resolusi Jihad NU 1945. Pengorbanan jiwa

²⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

dan raga yang dilakukan oleh kaum santri sangat menentukan nasib kemerdekaan NKRI. Maka metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan di atas. Berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen, catatan, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lazim digunakan dalam studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan, atau peristiwa-peristiwa sosial, memberikan informasi awal tentang isu yang ditanyakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.²⁷

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondidi yang sekarang ini terjadi

²⁷ Satirios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hal. 7.

atau ada. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menemukan relevansi peristiwa tersebut dengan realitas yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian; *kedua*, klarifikasi data, yaitu usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data; *ketiga* intrepretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber primer (utama), merupakan teks “Resolusi NU tentang *Jihad Fî Sabûlillah* tahun 1945 dan 1946.” Selain itu juga berupa artikel yang berjudul “Resolusi Jihad” dan artikel dengan judul “Kilas Resolusi Jihad

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.26.

dan Peristiwa 10 November”, keduanya ditulis oleh A. Khoirul Anam yang dipublikasikan di <http://www.nu.or.id>. Selain itu juga artikel yang ditulis oleh Hairus Salim HS dengan judul “50 Tahun Resolusi Jihad NU” yang dipublikasikan oleh Harian Umum Kompas edisi Jum'at, 10 Nopember 1995.

Sedangkan sumber sekunder (penunjang), dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan bahasan pemikiran tokoh yang diteliti, serta tulisan lain yang membahas tentang Resolusi Jihad NU. Kemudian disempurnakan dengan sumber tersier, yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs yang terkait dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data supaya diperoleh data yang memadai, dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran deduktif dan induktif.²⁹ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara Induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Bab ini membahas latar belakang berdirinya NU, nasionalisme para kyai dan kota Surabaya sebagai kota santri dan kota pahlawan.

Bab *ketiga* berisi tentang lahirnya Resolusi Jihad NU yang membahas makna dan hukum jihad, Laskar Hizbullah dan Sabilillah dan Isi Resolusi Jihad.

Bab *keempat*, membahas Dampak Resolusi Jihad yang meliputi, dampak internal terhadap NU, dan dampak terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Bab *kelima* merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis Resolusi Jihad NU 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian dan pembahasan serta analisis yang mendalam, sistematis dan objektif, dalam menelusuri peristiwa Resolusi Jihad NU atas peran politik dan militernya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, maka terdapat beberapa kesimpulan. Setidaknya kesimpulan tersebut akan dijelaskan dalam dua hal secara terpisah dan saling berkaitan.

Pertama, Resolusi Jihad NU memiliki peran yang sangat vital dalam mempertahankan kedaulatan NKRI yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat yang kafir. Resolusi tersebut adalah keputusan politik NU yang memandang seruan jihad *fī sabillâh* sesuai dengan semangat nasionalisme NU yang selalu mengutamakan kepentingan kebangsaan. NU yang mengambil keputusan Resolusi Jihad-nya melalui rapat konsul-konsul se-Jawa dan Madura, sekaligus menjadi keputusan Muktamar di Purwokerto berjihad untuk kepentingan bangsanya.

Sebagaimana makna jihad yang sering dikutip oleh Gusdur yang diambil dari kitab *Fathul Mu'in* yang menyebutkan salah satu pengertian jihad sebagai, “*daf'u dlarâr ma'sûmin muslimân kâna au ghaira muslim*” (melindungi kehormatan orang-orang yang perlu dibela, baik Muslim maupun non Muslim). Dalam konteks Resolusi Jihad, pengertian tersebut sepenuhnya menjadi rujukan yang kemudian diamalkan oleh NU. Yakni berjihad

melindungi kehormatan seluruh bangsa Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim, asalkan satu bangsa, satu nasib, seperjuangan.

Resolusi tersebut adalah bagian dari keputusan politik NU, namun sekaligus peran militer NU dalam melahirkan tentara nasional. Laskar santri (Hizbullah) dan laskar kyai (Sabilillah), kelak banyak menduduki peran strategis dalam posisi militer nasional. Namun sayang, sejak tahun 1950-an, tentara santri semakin tersingkir dan disingkirkan, sampai kemudian habis.

Kedua, sejarah membuktikan bahwa Resolusi Jihad benar-benar menjadi faktor penentu berlanjut atau tidaknya kemerdekaan Indonesia. Artinya dampak dari Resolusi Jihad yang nyata adalah kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang dinikmati oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. Sementara dampak bagi internal NU adalah banyaknya santri-santri yang kemudian direkrut menjadi bagian tentara nasional. Selain itu juga banyak kyai yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah.

Namun sayangnya penghargaan tersebut menjadi tidak berarti, karena penguasa negeri ini melupakan sejarah Resolusi Jihad dari catatan tinta emas sejarah. Justru peran NU terutama dalam Resolusi Jihad, termasuk banyak dukungan NU terhadap kedaulatan dan persatuan bangsa disembunyikan dari catatan sejarah. Bahkan kekuasaan selalu tidak memihak pada warga NU, yang nenek moyangnya sudah banyak berkorban untuk tanah air bersama ini.

Di medan politik NU tersingkir, dalam hal kebijakan pendidikan warga NU selalu dinomorduakan. Di lapangan kerja, warga NU banyak yang tidak terakomodir karena ijazah pesantren ditolak di dunia kerja. Bahkan ada pihak-

pihak yang berambisi untuk menenggelamkan NU dari tanah air, memutus ahli waris NU dari tradisi-tradisi nenek moyangnya. Hal ini menjadi penting untuk menjadi refleksi bersama, khususnya generasi NU yang seharusnya memetik buah kebahagiaan, karena benihnya sudah ditanam nenek moyangnya.

Bangsa Indonesia semuanya harus bertanya, seandainya tidak ada Resolusi Jihad NU yang mengobarkan jihad untuk melawan Sekutu, mungkinkah hari ini kita semua dan anak cucu bisa menghirup udara Indonesia dengan merdeka? Tetapi mengapa catatan sejarah tidak menganggapnya sebagai pengorbanan. Saatnya sekarang, semuanya menuju ruang rekonsiliasi. Ruang untuk menempatkan orang-orang yang benar-benar berjasa dan setia kepada bangsanya sebagai pahlawan. Bangsa ini harus memiliki kearifan untuk saling menghargai, jasa apapun dan oleh siapapun. Apalagi jasa itu bukan sekedar jasa menyelamatkan nyawa satu atau dua orang. Tetapi menyelamatkan kedaulatan dan masa depan bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan golongan.

B. Saran-saran

Resolusi Jihad NU telah mengorbankan jiwa dan raga para pejuangnya untuk kemerdekaan tanah airnya. Namun sampai hari ini, banyak generasi bangsa yang tidak mengenal tentang tragedi bersejarah itu, bahkan generasi NU sendiri tidak mengerti. Hal ini dikarenakan, para sejarawan nasional atas kepentingan penguasa tidak mencatat Resolusi Jihad NU dalam tinta emas sejarah.

Oleh karena itu untuk para sejarawan, saatnya sekarang sejarah harus berbicara jujur, untuk mengajarkan kepada generasi bangsa bahwa Resolusi Jihad NU adalah pengorbanan yang besar dari para kyai dan santri yang setia dan mencintai tanah airnya. Karena orang-orang pesantren selalu meyakini hadis Rasulullah saw bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Dengan demikian semua generasi bangsa bisa duduk bersama untuk saling menghargai peran masing-masing.

C. Penutup

Demikian, laporan hasil penelitian ini kami susun, dengan maksud untuk memenuhi tugas akademik pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sangat berharap akan muncul banyak kritik konstruktif untuk menyempurnakan karya ini. Semoga saja menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi para pengkaji Politik Islam. Sebagaimana yang menjadi keyakinan Imam Syafi'i, "pendapat kami benar, tetapi ada kemungkinan salah. Sementara pendapat orang lain salah, namun ada kemungkinan benar." *Wallahu a'lam bishowab.*

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran/ Tafsir:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971

Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008

Kelompok Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis:

Bahreisj, Hussein, *Hadis Shahih Al Jami'us Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: CV Karya Utama, t.t.

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

As-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983

Pengurus Wilayah LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama, 2005

Hikam, Muhammad AS, dkk., (ed), *Fikih Kewarganegaraan*, Jakarta: PB PMII, 2000

Kelompok Lain-lain:

Abegebriel, A. Maftuh, dkk. (ed), *Negara Tuhan : The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004

Ali, As'ad Said, *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*, Jakarta: LP3ES, 2008

Amin, M. Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: al-Amin Press, 1996

Anam, A. Khoirul, "Kilas Resolusi Jihad dan Peristiwa 10 November," <http://www.nu.or.id>, akses tanggal 20 Mei 2009

Anam, Choirul, *Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, Surabaya: Majalah Aula, 1990

Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985

Bruinessen, Martin van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1994

Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Fadeli, Soleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Surabaya: Khalista, 2008

Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 2008

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998

Hardianto, Dwi, "Hizbulah: Laskar Pejuang yang di Buang," *Majalah Islam Sabili*, Edisi Khusus, Juli 2004

HS, Hairus Salim, "50 Tahun Resolusi Jihad NU", dimuat dalam SKH. Kompas edisi Jum'at, 10 November 1995. Lihat, apakabar@access.digex.net, akses tanggal 20 Mei 2009.

----, *Kelompok Paramiliter NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Hidayat, Yulianta Wahyu, "Fatwa Jihad NU dalam konteks Negara Indonesia; Studi Analisis terhadap Resolusi Jihad NU tahun 1945 dan 1946", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LKiS, 1995

Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008

Liddle, R. William, "Skripturalisme Media Dakwah: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, 1993

Maliki, Zainuddin, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Matanasi, Petrik, *Pemberontak Tak Selalu Salah: Seratus Pembangkangan di Nusantara*, Yogyakarta: I:Boekoe, 2009

Masdar, Umaruddin, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU: Tradisi NU, Jalan PKB*, Jakarta: DPP PKB, 2008

Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kyai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007

Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Saleh, Fauzan, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004

Sarantakos, Satirios, *Social Research*, Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993

Siradj, Said Aqiel, *Ahlassunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997

Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: LP3ES, 1994

Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1986

Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya: Khalista, 2007

Yusuf, Slamet Effendi, dkk., *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, Jakarta: CV Rajawali, 1983

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta: P3M, 1986

Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2008

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Gunaji

Tempat Tgl lahir : Pati, 01 Maret 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : satu dari dua bersaudara

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Sidoluhur RT 04/01, Kec. Jaken, Kab. Pati

Nomor HP : 08563872478

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Sidoluhur 02, lulus tahun 1996

SMPN 1 Sumber-Rembang, lulus tahun 1998

SMAN 2 Rembang, lulus tahun 2002

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2004

Yogyakarta, 13 Juli 2009

GUNAJI

NIM: 04370054